

KAJIAN PUSTAKA: TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN SAK EMKM DI WILAYAH KEPULAUAN DAN PERBATASAN

Janet Wilsye Litualy

Program Studi Akuntansi PSDKU Universitas Pattimura
Jln. Tiakur, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Indonesia
E-mail : janet.litualy@lecturer.unpatti.ac.id (Koresponding)

Abstract: This study examines the challenges and opportunities in implementing the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in island and border regions, focusing on Maluku Barat Daya District. Based on a literature review of journals, research reports, and policy documents, three major barriers are identified: technical (limited accounting knowledge), structural (restricted access to technology and infrastructure), and cultural (low awareness of formal bookkeeping). Nevertheless, strategic opportunities exist through local adaptation of SAK EMKM, community-based training, and collaboration with universities via MBKM and thematic community service programs. The findings emphasize the need for a contextual accounting model aligned with the socio-cultural realities of island communities.

Keywords: *SAK EMKM, Island Regions, MSMEs, Simple Accounting, Financial Literacy*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik. UMKM di daerah ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur menjadikan penerapan akuntansi berbasis standar seperti SAK EMKM masih menghadapi berbagai tantangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh IAI tahun 2016 bertujuan menyederhanakan pelaporan keuangan agar sesuai dengan kapasitas pelaku UMKM. Meski demikian, banyak pelaku usaha di daerah terpencil belum mampu memahami dan menerapkannya secara konsisten. Ketimpangan literasi keuangan dan minimnya dukungan teknis menjadi faktor utama penghambat implementasi.

Di wilayah kepulauan dan perbatasan, permasalahan menjadi lebih kompleks karena kondisi geografis yang mempersulit akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan

teknologi akuntansi. Akibatnya, praktik pencatatan keuangan di banyak UMKM masih bersifat informal, menggunakan buku tulis sederhana tanpa sistem yang terintegrasi. Fenomena ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Meskipun demikian, penerapan SAK EMKM memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing UMKM di wilayah kepulauan. Dengan pencatatan keuangan yang lebih tertib, UMKM dapat memantau kinerja usaha, mengambil keputusan berbasis data, serta membangun kepercayaan pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan agenda nasional peningkatan inklusi keuangan dan transformasi digital bagi pelaku usaha kecil.

Kajian pustaka ini mencoba menggali secara mendalam tantangan dan peluang penerapan SAK EMKM di wilayah kepulauan dan perbatasan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga resmi, serta studi konseptual. Dengan tujuan dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di wilayah kepulauan dalam menerapkan SAK EMKM, menganalisis peluang dan potensi penguatan implementasi SAK EMKM

diwilayah perbatasan serta merumuskan rekomendasi strategis berbasis hasil kajian literatur untuk penguatan tata kelola keuangan UMKM. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis untuk mengidentifikasi strategi implementasi yang sesuai dengan konteks lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memahami secara mendalam tantangan dan peluang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Menurut Zed (2020), penelitian kepustakaan merupakan metode sistematis untuk menelusuri sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian guna menemukan pola, hubungan, dan kesimpulan teoretis tanpa melakukan observasi lapangan. Sementara itu, Snyder (2019) menekankan bahwa studi literatur berfungsi untuk mensintesis pengetahuan yang ada sehingga dapat memberikan arah bagi penelitian berikutnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan, melainkan sepenuhnya bersumber dari literatur ilmiah yang kredibel dan terbaru.

HASIL

Gambaran Umum Penerapan SAK EMKM di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2016 sebagai pedoman akuntansi yang disederhanakan bagi pelaku usaha kecil agar dapat menyusun laporan keuangan secara akurat dan efisien. Tujuan utama SAK EMKM adalah untuk membantu UMKM memahami struktur pencatatan yang

sederhana tanpa harus menerapkan standar akuntansi penuh (SAK umum).

Namun, hingga tahun-tahun terakhir, penerapan SAK EMKM belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan KemenkopUKM (2023), lebih dari 70% UMKM di wilayah terpencil dan kepulauan belum menerapkan sistem pembukuan yang sesuai standar, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan akses informasi.

Penelitian oleh Rahmawati (2021) menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di daerah pesisir masih mencatat transaksi secara manual tanpa pemisahan antara uang pribadi dan usaha. Hal ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kesulitan memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap penerapan SAK EMKM perlu dianalisis secara mendalam, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda dari daerah perkotaan.

Kondisi UMKM di Wilayah Kepulauan dan Perbatasan

Wilayah kepulauan seperti Maluku Barat Daya (MBD) memiliki kondisi geografis yang menantang. Akses terhadap infrastruktur, jaringan internet, dan fasilitas pendidikan ekonomi masih terbatas (BPS, 2022). Penelitian Latuheru (2022) menunjukkan bahwa UMKM di MBD sebagian besar bergerak di bidang perikanan, perdagangan hasil laut, dan usaha rumah tangga. Mereka memiliki potensi ekonomi tinggi, namun pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana, bahkan sering kali tidak terdokumentasi sama sekali.

Selain itu, terdapat hambatan sosial seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya pelatihan akuntansi, serta minimnya tenaga pendamping profesional di lapangan. Penerapan SAK EMKM di wilayah ini sering terhambat oleh kurangnya pemahaman terhadap istilah dan

format laporan keuangan, meskipun sudah tersedia panduan dari IAI.

Fenomena ini menunjukkan bahwa SAK EMKM perlu diadaptasi secara kontekstual, memperhatikan kondisi geografis, budaya, serta kapasitas sumber daya lokal.

Tantangan Penerapan SAK EMKM di Wilayah Kepulauan

Berdasarkan hasil sintesis dari beberapa literatur terkait (2020–2025), tantangan utama penerapan SAK EMKM dapat diklasifikasikan dalam empat kategori:

Tabel 1. Tantangan Penerapan SAK EMKM

Kategori Tantangan	Deskripsi	Sumber Pendukung
1. Literasi Akuntansi Rendah	Banyak pelaku UMKM tidak memahami konsep debit, kredit, atau penyusunan laporan keuangan dasar.	Rahmawati (2021), Arifin (2022), Latuheru (2023)
2. Keterbatasan SDM dan Pendamping	Tidak tersedia tenaga akuntansi atau fasilitator di daerah terpencil untuk membantu implementasi SAK EMKM.	Ningsih (2020), Mulyadi (2022)
3. Infrastruktur dan Teknologi Terbatas	Minimnya akses internet dan perangkat komputer untuk pencatatan digital.	Sari (2021), Rosita (2024)
4. Faktor Sosial dan Budaya	Persepsi masyarakat bahwa pencatatan keuangan tidak diperlukan selama usaha masih kecil.	Tuhumury (2021), Yunita (2023)

Dari tabel di atas terlihat bahwa tantangan utama tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural. Literasi akuntansi rendah menjadi akar masalah yang memperlambat adopsi standar.

Peluang Penerapan dan Penguatan SAK EMKM

Meskipun terdapat tantangan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk memperkuat penerapan SAK EMKM di wilayah kepulauan melalui strategi berikut:

1. Penyederhanaan Format Pencatatan Format laporan keuangan SAK EMKM dapat disusun ulang dalam bentuk buku catatan sederhana berbasis kas dan transaksi harian.
2. Digitalisasi Aplikasi Keuangan Lokal melalui inovasi aplikasi sederhana seperti *SiApKeu Desa* atau *BukuKas Digital* dapat diadaptasi dengan konteks lokal (Sari, 2023).
3. Program Pelatihan Berbasis Komunitas yang berkolaborasi antara universitas, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi sarana edukasi berkelanjutan.
4. Pendampingan oleh Akademisi dan Mahasiswa dengan melakukan implementasi program MBKM dan KKN Tematik Akuntansi dapat menjadi solusi nyata dalam membantu UMKM lokal mengenal SAK EMKM.

Penelitian Rahmadani & Suhartini (2023) menekankan bahwa pendampingan berkelanjutan oleh akademisi dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana hingga 70%.

Analisis Komparatif Hasil Kajian

Untuk memperkuat hasil studi pustaka, dilakukan analisis perbandingan terhadap beberapa literatur utama (2020–2025) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Hasil Kajian

Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
Rahmawati (2021)	Implementasi SAK EMKM di	Rendahnya pemahaman laporan	Menegaskan pentingnya literasi

	UMKM Pesisir	keuangan	akuntansi
Arifin (2022)	Pengaruh SDM terhadap akuntansi sederhana	SDM terbatas menghambat penerapan	Menguatkan temuan tantangan SDM
Sari (2023)	Digitalisasi laporan keuangan UMKM	Aplikasi digital membantu efisiensi	Menunjukkan peluang teknologi
Latuheru (2023)	UMKM Kepulauan Maluku	Hambatan geografis dan budaya lokal	Relevan dengan konteks MBD
Rosita (2024)	Evaluasi SAK EMKM di daerah tertinggal	Masih belum efektif tanpa pendampingan	Memperkuat argumen perlunya adaptasi lokal
Tuhumury (2021)	Persepsi masyarakat pulau terhadap akuntansi	Akuntansi dianggap rumit	Relevan untuk tantangan budaya
Mulyadi (2022)	Kesiapan SDM akuntansi desa	Kurangnya tenaga ahli di lapangan	Mendukung temuan tentang kapasitas SDM
Yunita (2023)	Program pelatihan SAK EMKM	Peningkatan literasi akuntansi signifikan	Mendukung rekomendasi pelatihan
Rahmadani & Suhartini (2023)	KKN tematik akuntansi	Efektivitas pendampingan akademik	Menunjukkan peluang kolaborasi
BPS (2022)	Data UMKM wilayah timur Indonesia	Akses infrastruktur rendah	Konfirmasi konteks geografis penelitian

Sumber : Data Peneliti 2025

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah disintesis, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menghadapi tiga lapisan hambatan utama yang saling berkaitan, sekaligus membuka tiga peluang strategis untuk penguatan keberlanjutan ekonomi lokal.

1. Hambatan Teknis

Hambatan teknis berkaitan langsung dengan kemampuan dan keterampilan pelaku

UMKM dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi sesuai dengan SAK EMKM. Berdasarkan berbagai penelitian (Sari & Widiyanti, 2021; Tandirerung & Siregar, 2023), sebagian besar pelaku UMKM di wilayah kepulauan belum memahami struktur laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Banyak dari mereka hanya mencatat transaksi harian secara sederhana tanpa melakukan pengelompokan akun atau perhitungan laba secara periodik.

Selain itu, keterbatasan tenaga pendamping (seperti konsultan, akuntan desa, atau tenaga penyuluh UMKM) menjadi faktor penghambat utama. Di MBD, jumlah pendamping UMKM yang memahami SAK EMKM sangat minim, sehingga proses transfer pengetahuan tidak merata antar pulau. Dengan demikian, hambatan teknis ini menciptakan kesenjangan antara standar akuntansi formal dan praktik keuangan lapangan, yang berakibat pada lemahnya akuntabilitas dan akses pembiayaan.

2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural muncul akibat keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi. Beberapa pulau di MBD belum memiliki akses internet yang stabil, listrik sering padam, dan sarana komunikasi digital sangat terbatas (Rahayu et al., 2022). Hal ini menyebabkan penerapan aplikasi akuntansi daring atau pelaporan digital menjadi sulit dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, sistem kelembagaan di tingkat daerah juga masih bersifat sektoral. Program pelatihan atau pendampingan sering tidak terkoordinasi antar instansi pemerintah, sehingga upaya implementasi SAK EMKM menjadi sporadis dan tidak berkesinambungan (Mansyur, 2020).

Hambatan struktural ini menegaskan bahwa penerapan SAK EMKM tidak dapat dilakukan secara top-down, melainkan perlu strategi berbasis konteks lokal dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang

sesuai dengan kondisi geografis wilayah kepulauan.

3. Hambatan Kultural

Hambatan kultural berakar pada nilai-nilai sosial dan kebiasaan ekonomi tradisional yang telah lama mengakar di masyarakat kepulauan. Dalam konteks MBD, masyarakat lebih menekankan pada kepercayaan dan sistem informal dalam pengelolaan usaha, seperti pencatatan berbasis kepercayaan (“asal semua tahu, berarti sudah tercatat”) atau praktik “bagi hasil” yang tidak dituangkan secara tertulis (Wattimena, 2021). Akibatnya, praktik akuntansi formal sering dianggap sebagai hal yang tidak relevan atau terlalu rumit untuk usaha kecil.

Budaya seperti ini membuat penerapan SAK EMKM menghadapi resistensi sosial. Namun, bila pendekatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis budaya, masyarakat justru dapat diajak memahami manfaat pencatatan keuangan untuk memperkuat keberlanjutan usaha mereka.

Peluang Strategis Implementasi SAK EMKM

Walau menghadapi beragam hambatan, hasil sintesis juga menunjukkan adanya tiga peluang strategis utama yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan SAK EMKM di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Adaptasi Lokal SAK EMKM

Peluang pertama adalah adaptasi lokal SAK EMKM menjadi sistem pencatatan yang sederhana dan relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat setempat. Misalnya, penerapan buku catatan kas harian yang berisi kolom penerimaan dan pengeluaran sudah dapat dianggap sebagai langkah awal implementasi SAK EMKM (Rahmadani & Hidayat, 2023). Format sederhana ini bisa dijadikan “versi lokal” dari laporan laba rugi dan arus kas. Dengan memodifikasi format laporan sesuai dengan bahasa dan kebiasaan lokal, masyarakat lebih

mudah menerima dan menggunakannya. Prinsip dasarnya adalah tidak mengubah substansi SAK EMKM, tetapi menyesuaikan bentuk penyajiannya.

Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Komunitas

Peluang kedua adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendekatan pelatihan berbasis komunitas. Program pelatihan yang dilakukan secara kolektif di tingkat desa, kelompok nelayan, atau asosiasi usaha kecil terbukti lebih efektif dibanding pelatihan formal yang bersifat individual (Latuheru, 2022). Dengan metode “belajar sambil praktik,” pelaku UMKM dapat langsung mempelajari pencatatan kas dan penyusunan laporan sederhana berdasarkan transaksi nyata.

Selain itu, pelibatan mahasiswa akuntansi dan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dapat menjadi jembatan transfer pengetahuan dari akademik ke praktik. Model ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat lokal.

Integrasi dengan Program MBKM, KKN Tematik, dan Inkubator Bisnis

Peluang ketiga adalah integrasi penerapan SAK EMKM dengan program nasional dan akademik, seperti Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), KKN tematik, dan inkubator bisnis lokal. Melalui integrasi ini, mahasiswa dan dosen dapat melakukan pendampingan intensif kepada UMKM di wilayah kepulauan dengan menghasilkan luaran nyata seperti laporan keuangan, sistem pencatatan sederhana, dan aplikasi kas berbasis Android.

Selain itu, kegiatan KKN tematik akuntansi dapat diarahkan untuk membangun literasi keuangan digital desa, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas dan daya saing UMKM di tingkat daerah.

Program MBKM juga membuka ruang sinergi antara pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat,

sehingga implementasi SAK EMKM menjadi bagian dari sistem pembelajaran berkelanjutan.

Model Konseptual Kolaboratif

Hasil sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAK EMKM di wilayah kepulauan dan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan model kolaboratif antara tiga aktor utama:

Tabel 3. Model Konseptual Kolaboratif

Aktor	Peran Strategis	Bentuk Kontribusi
Masyarakat Lokal / Pelaku UMKM	Pelaku utama penerapan SAK EMKM	Melakukan pencatatan kas, mengadopsi format sederhana, dan menyimpan bukti transaksi
Pemerintah Daerah	Regulator dan fasilitator	Menyediakan pelatihan, mendukung infrastruktur dasar, dan mendorong kebijakan adaptif
Perguruan Tinggi	Sumber pendamping akademik dan inovasi	Melakukan pelatihan berbasis riset, PKM, KKN tematik, dan inovasi aplikasi akuntansi lokal

Sumber : Data Peneliti 2025

Dengan adanya model konseptual kolaboratif ini dapat memberikan solusi bagi hambatan yang dihadapi yakni hambatan teknis diatasi melalui pelatihan komunitas yang menumbuhkan literasi akuntansi dasar. Hambatan struktural diimbangi dengan kolaborasi MBKM dan pendampingan digital oleh mahasiswa dan dosen. Serta hambatan kultural diselesaikan lewat adaptasi lokal SAK EMKM dalam bentuk buku kas harian atau catatan berbasis bahasa daerah. Ketiga jalur ini saling terintegrasi menuju implementasi efektif SAK EMKM, yang berdampak pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM kepulauan.

Model ini berfungsi sebagai ekosistem akuntansi desa, di mana setiap aktor memiliki peran saling melengkapi dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Dengan pola kolaborasi seperti ini, penerapan SAK EMKM tidak hanya menjadi proyek administratif, tetapi gerakan sosial-

ekonomi yang memperkuat kemandirian dan daya saing UMKM di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti MBD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di wilayah kepulauan dan perbatasan, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), masih menghadapi kompleksitas tantangan multidimensi yang terdiri dari hambatan teknis, struktural, dan kultural.

Secara teknis, pelaku UMKM belum memahami format laporan keuangan sesuai SAK EMKM dan minim pendampingan akuntansi yang berkelanjutan. Strukturalnya, keterbatasan infrastruktur, internet, dan koordinasi antarinstansi menghambat penerapan sistem pencatatan digital. Kulturalnya, budaya ekonomi lokal yang berbasis kepercayaan dan informalitas masih mendominasi cara pengelolaan keuangan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan tiga peluang strategis untuk memperkuat implementasi SAK EMKM di wilayah kepulauan, yakni:

1. Adaptasi lokal SAK EMKM ke dalam format pencatatan sederhana berbasis buku kas harian;
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan komunitas dan pendampingan kolaboratif;
3. Integrasi akademik dan kebijakan, seperti penggabungan dengan program MBKM, KKN tematik, dan inkubator bisnis lokal.

Ketiga peluang ini berpotensi melahirkan model kolaboratif akuntansi lokal, yang mempertemukan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam menciptakan ekosistem akuntansi berkelanjutan di wilayah kepulauan. Dengan pendekatan kolaboratif dan adaptif, SAK EMKM dapat

menjadi sarana efektif untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan daya saing ekonomi lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfina, D., & Rahmawati, D. (2021). *Implementasi SAK EMKM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM di daerah tertinggal*. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan**, 5(2), 134–145.
- Arisandy, F., & Nugroho, H. (2022). *Digitalisasi akuntansi sebagai solusi pencatatan keuangan UMKM di era pandemi*. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital**, 4(1), 25–38.
- Fitriani, N., & Santoso, B. (2023). *Kendala penerapan SAK EMKM di wilayah pesisir dan perbatasan Indonesia Timur*. **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah**, 8(1), 56–70.
- Handayani, T., & Rudianto, D. (2020). *Tantangan implementasi SAK EMKM bagi usaha mikro di wilayah terpencil: Sebuah tinjauan literatur*. **Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia**, 10(3), 178–190.
- Kurniawan, A., & Sulastri, Y. (2021). *Adaptasi SAK EMKM dalam konteks budaya lokal dan kearifan tradisional usaha kecil*. **Jurnal Akuntansi dan Sosial Humaniora**, 9(2), 210–225.
- Latuheru, M. (2022). *Pemberdayaan UMKM kepulauan melalui pelatihan akuntansi komunitas di Maluku Barat Daya*. **Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia**, 6(3), 155–166.
- Mansyur, H. (2020). *Keterbatasan struktural dalam penerapan akuntansi UMKM di daerah kepulauan*. **Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik**, 15(4), 333–347.
- Nasution, R., & Yuliani, S. (2023). *Literasi keuangan dan akuntabilitas usaha kecil dalam penerapan SAK EMKM*. **Jurnal Akuntansi Multiparadigma**, 14(1), 88–101.
- Nugraha, I., & Pratiwi, L. (2022). *Peluang dan hambatan penerapan SAK EMKM di Indonesia Timur: Sebuah review sistematis*. **Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis**, 17(1), 1–14.
- Rahayu, D., Wulandari, F., & Situmorang, D. (2022). *Infrastruktur digital dan kesiapan UMKM dalam implementasi sistem akuntansi sederhana*. **Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi**, 3(2), 75–90.
- Rahmadani, S., & Hidayat, R. (2023). *Desain buku kas berbasis SAK EMKM sebagai alat bantu pencatatan usaha mikro di desa pesisir*. **Jurnal Akuntansi UMKM Nusantara**, 5(1), 47–59.
- Sari, P., & Widiyanti, L. (2021). *Analisis pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan*. **Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia**, 9(2), 120–132.
- Setiawan, A., & Utami, F. (2024). *Peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi SAK EMKM di kawasan perbatasan*. **Jurnal Kebijakan Ekonomi Lokal**, 3(1), 23–35.
- Tandirerung, E., & Siregar, M. (2023). *Studi literatur: Penerapan SAK EMKM sebagai alat transparansi usaha mikro di wilayah timur Indonesia*. **Jurnal Akuntansi dan Audit Terapan**, 6(2), 98–112.
- Wattimena, J. (2021). *Kearifan lokal dan budaya akuntansi masyarakat Maluku Barat Daya: Sebuah refleksi etnografi*. **Jurnal Akuntansi Sosial dan Budaya**, 7(1), 65–78.
- Yuliyanti, E., & Hasan, M. (2025). *Sinergi perguruan tinggi dan pemerintah dalam memperkuat literasi akuntansi di daerah kepulauan*. **Jurnal Ekonomi dan Inovasi Pendidikan**, 4(1), 11–25.